

**PEMAKAIAN SISTEM *PAYLATER* DALAM PEMBAYARAN JUAL BELI
ONLINE MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*))**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:
EVA SAPUTRI
NPM.1621030612

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**PEMAKAIAN SISTEM *PAYLATER* DALAM PEMBAYARAN JUAL BELI
ONLINE MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*))**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah



Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.Hum

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

Di era modern ini perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembelian, pembayaran, dan pinjaman secara *online* seperti di *Gojek*. *Gojek* memiliki metode pembayaran yaitu *paylater*. *Paylater* adalah metode pembayaran dimana perusahaan aplikasi menalangi dahulu pembayaran atau memberikan pinjaman secara elektronik. Dalam praktiknya, perusahaan *Gojek* akan menalangi dahulu pembayaran terhadap transaksi yang dilakukan oleh pengguna atau memberikan pinjaman kepada pengguna, *Gojek* memberikan batas limit pinjaman Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta biaya administrasi atau biaya berlangganan Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbulan dan pengguna dapat membayar tagihan tersebut setiap akhir bulan menggunakan *Gopay*. Jika pengguna tidak dapat membayar setelah jatuh tempo maka akan dikenakan biaya denda Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) perharinya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli *online* pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*)?, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Pemakaian sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli *online* pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*)?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli *online* pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*), dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemakaian sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli *online* pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*).

Penelitian ini termasuk penelitian (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap karyawan *Gojek* dan pengguna *Gojek*, data sekunder yang diperoleh dari data pustaka. Dalam sistem pembayaran *paylater* di *Gojek*, terdapat biaya tambahan dari pinjaman pokok tersebut yang cukup memberatkan pengguna yaitu adanya biaya administrasi atau biaya berlangganan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbulan, dan biaya denda keterlambatan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) perhari setelah jatuh tempo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemakaian sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli *online* di *Gojek* pemakaian sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli *online* di *Gojek*, tidak sesuai dengan Syariat Islam karena adanya penambahan nilai pokok pada jumlah pinjaman yang termasuk dalam kategori riba.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eva Saputri

NPM : 1621030612

Jurusan/prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pemakaian Sistem *Paylater* dalam Pembayaran Jual Beli *Online* Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*))” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 September 2020
Penulis

Eva Saputri
NPM. 1621030612



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PEMAKAIAN SISTEM PAYLATER DALAM
PEMBAYARAN JUAL BELI ONLINE
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa
(Gojek))**

**Nama : Eva Saputri
NPM : 1621030612
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.S.I
NIP. 197304142000032002

Eti Karini, S.H., M.Hum
NIP. 197308162003122003

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PEMAKAIAN SISTEM PAYLATER
DALAM PEMBAYARAN JUAL BELI ONLINE MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di PT Aplikasi Karya
Anak Bangsa (Gojek)”** disusun oleh Eva Saputri, NPM.
1621030612, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
(Mu'amalah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal
22 Oktober 2020

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. (.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I. (.....)

Penguji Utama : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Penguji II : Eti Karini, S.H., M.Hum. (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Khairuddin, M.H.
NIP. 19621022199303100

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرة وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.

(QS. Al-Baqarah [2]:245)¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2007), h. 45.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada:

1. Ayah dan ibu ku tercinta, Bapak Sunaryo dan Ibu Yuliah, yang senantiasa selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi serta memberikan doanya disetiap sujudnya yang selalu membangkitkan dan menguatkan dalam menuntut ilmu.
2. Yang saya sayangi adikku Fitri Tia Sari terima kasih atas segala doa, dukungan semangat dalam segala hal motivasi dan kasih sayang yang tak terhingga.
3. Untuk semua keluarga besarku yang tercinta, terimakasih atas segala doa dan motivasi yang tak terhingga.
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta yang selalu saya bangga-banggakan.

RIWAYAT HIDUP

Eva saputri dilahirkan di Desa Tanjung Rejo 2 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, pada tanggal 14 April 1998 yang merupakan anak ke satu dari dua bersaudara merupakan buah cinta dari pasangan Bapak Sunaryo dan Ibu Yuliah adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak ditempu di TK Al-Azhar 8 Natar, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang diselesaikan pada Tahun 2004.
2. Pendidikan Sekolah Dasar ditempuh di SDN 5 Merak Batin, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang diselesaikan pada Tahun 2010.
3. Melanjutkan Tingkat Pendidikan Menengah Pertama di SMPN Natar, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dan diselesaikan pada Tahun 2013.
4. Melanjutkan Tingkat Pendidikan Menengah Atas di SMA Yadika Natar, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang diselesaikan pada Tahun 2016.
5. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan tinggi UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Muamalah dan lulus pada Tahun 2020.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Pemakaian sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli *online* menurut perspektif hukum Islam (Studi di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*)) ” dapat diselesaikan. Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pegikut-pengikutnya yang setia.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I, dan Ibu Juuhrotul Khulwah, M.Si selaku Ketua dan sekretaris jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.S,i selaku pembimbing I dan Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum selaku pembimbing II yang telah banyak

meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan segenap civitas akademika UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Teman-teman seperjuangan KKN 41 Desa Bumi Mas yang telah memberi banyak pengalaman.
8. Teman-teman PPS kelompok 47 yang turut membantu suksesnya jalan munaqosyah.
9. Teman-teman seperjuangan saya Siti Nurhasana, Sulistiandari, Elma Novianti, Alffiyyah Rahmah yang selama ini menemani dan untuk kelasku tercinta Mu'amalah angkatan 2016 khususnya Muamalah F yang saya banggakan.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung; Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya, Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Aamiin

Bandar Lampung , 15 September 2020
Penulis,

Eva Saputri
NPM. 1621030612

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian.....	6
G. Signifikasi Penelitian.....	7
H. Metode Penelitian.....	7

BAB II KAJIAN TEORI

A. Akad <i>Qard</i> menurut Hukum Islam.....	13
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Qard</i>	13
2. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	18
3. Macam-macam akad <i>Qard</i>	21
4. Tambahan akad <i>Qard</i>	22
5. Ketentuan akad <i>Qard</i>	24

6. Berakhirnya akad <i>Qard</i>	28
7. Waktu dan Sistem Pembayaran menurut Islam.....	31
B. Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/ IX/2017 tentang uang Elektronik Syariah	38
C. Riba	40
D. Tinjauan Pustaka	43

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (<i>Gojek</i>).....	49
1. Sejarah Singkat Perusahaan.....	49
2. Visi dan Misi PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (<i>Gojek</i>)	51
a. Visi	51
b. Misi	51
B. Logo PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (<i>Gojek</i>).....	51
C. Struktur Organisasi PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (<i>Gojek</i>)	52
D. Pelaksanaan Pemakaian Sistem <i>Paylater</i> di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (<i>Gojek</i>).....	57

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Sistem <i>Paylater</i> dalam Pembayaran Jual Beli <i>Online</i> di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (<i>Gojek</i>)	65
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemakaian Sistem <i>Paylater</i> dalam Jual Beli <i>Online</i> Di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (<i>Gojek</i>)	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam judul skripsi maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat didalam judul skripsi “Pemakaian Sistem *Paylater* Dalam Pembayaran Jual Beli *Online* Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*))”. Adapun istilah-istilah tersebut:

1. Sistem *Paylater*

Sistem *Paylater* adalah metode pembayaran di mana perusahaan aplikasi menalangi dulu pembayaran atau pemberian pinjaman uang secara elektronik.

2. Jual Beli *Online*

Jual beli *online* adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet dimana antara penjual dan pembelian tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik yang dimana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di suatu website atau toko maya.¹

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang Islam.²

¹Priyono Utomo, *Raja Bisnis Online*, (Yogyakarta: Mediakom, 2013), h. 4.

²Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam, Cet Ketiga*, (Jakarta: Bumi Askara, 1999), h. 17.

4. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*)

PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*) adalah sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek.

Menurut uraian diatas dapat di simpulkan, yang di maksud dengan judul skripsi ini adalah penelitian tentang sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli *online* menurut perspektif hukum Islam di PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*) atau menelaah dari sudut pandang hukum Islam tentang sistem *paylater*.

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa hal yang memotivasi untuk memilih dan membahas judul skripsi ini, yaitu:

1. Alasan Objektif

- a. Karena pada sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli *online* di duga mengandung riba.
- b. Karena untuk mengetahui hukum Islam dari sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli *online* di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*).

2. Alasan Subjektif

- a. Bahwa data dan literatur yang mendukung pembahasan skripsi ini cukup tersedia, oleh karena itu penulis yakin skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
- b. Masalah yang dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung sehingga sesuai disiplin ilmu yang penulis tekuni ini.

C. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut *habluminallah* dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan *habluminannas*. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya selama hidup didunia. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal sebagai muamalah.³ Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan lainnya.⁴ Seiring dengan perkembangan zaman saat ini dalam pemenuhan kebutuhannya, tidak menutup kemungkinan seseorang itu akan melakukan kegiatan ekonomi untuk menambah penghasilan seperti halnya utang piutang.

Perkembangan teknologi internet di era modern ini memberikan dampak positif bagi manusia, yaitu memudahkan dalam berinteraksi bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya dan memudahkan dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Perkembangan teknologi ditandai dengan penggunaan telepon genggam pintar (*smarthphone*) yang memungkinkan penggunaannya untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkan. Para pelaku dunia usaha yang mereka jalani pada internet melalui aplikasi khusus yang dapat diakses oleh pengguna *smarthphone* yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini adalah *Gojek*. *Gojek* merupakan perusahaan armada motor (ojek)

³Achmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

⁴Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi Bisnis, Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 6.

berbasis *online*. Kehadiran *Gojek* ditengah masyarakat cukup di rasakan masyarakat. Tentunya karena mereka bisa mendapatkan segala macam kebutuhan dengan mudah hanya dengan aplikasi yang ada di *smarthphone* tersebut baik itu membeli barang, membeli makanan, memesan jasa ojek dan lainnya.

Gojek memiliki metode pembayaran *Paylater*. Metode pembayaran ini dapat di gunakan untuk layanan, *Goshop, Gofood, Goride, Gosend, Gopulsa* dan layanan lainnya yang ada di aplikasi *Gojek*. *Paylater* adalah metode pembayaran baru di *Gojek*, seperti kartu kredit dimana perusahaan aplikasi menalangi dulu pembayaran tagihan, dimana kita bisa membeli atau memesan layanan gojek kapan saja dan membayarnya cukup sekali di akhir bulan, pengguna memiliki batas limit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta biaya berlangganan atau biaya administrasi. Metode pembayaran *Paylater* ini bisa digunakan untuk transaksi di toko atau di aplikasi *Gojek*. Sistem *Paylater* dalam pembayaran di *Gojek* adalah sistem dimana membeli atau memesan sekarang dan bayar nanti, pihak *Gojek* akan memberikan pinjaman kepada pengguna untuk membayar transaksi tersebut.

Pemberian pinjaman yang tersedia *Paylater* di *Gojek* termasuk akad *Qard* didalam Hukum Islam. *Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁵ Memberikan pinjaman atau utang piutang memiliki nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah SWT.

QS. Al-Baqarah ayat 245:

⁵Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), h. 131.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرةً ۖ وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٦٥﴾

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harganya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lalu kamu dikembalikan”.⁶

Pinjaman atau utang piutang merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, dan orang yang memberikan utang pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan baik merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam syariat Islam, pelaksanaan utang piutang dalam bermuamalah hendaknya dilakukan dengan hati-hati agar tidak bertentangan dengan syariat Islam karena utang piutang ini bentuk muamalah yang cukup banyak dilakukan oleh manusia dalam memenuhi dalam kebutuhan hidup.⁷

Menurut keterangan diatas, maka dianggap perlu untuk diadakan penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai penggunaan sistem *paylater*, karena sistem pembayaran *paylater* mengandung unsur yang merugikan masyarakat. penelitian ini berjudul “Pemakaian Sistem *Paylater* dalam Pembayaran Jual Beli *Online* menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*)).

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Penerbit J-Art, 2004), h. 37.

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 200.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi lapangan dapat dipilih-pilih sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah Sistem *Paylater* Dalam Pembayaran Jual Beli *Online* yang terdapat di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*).

E. Rumusan Masalah

Menurut uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli *online* pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*)?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemakaian sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli *online* pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*)?

F. Tujuan Masalah dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan masalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli online pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*).
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pemakaian sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli online pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini di harapkan bisa menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan dapat diberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya dalam praktik bagaimana pemakaian sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli *online* di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*) dan mengetahui bagaimana menurut hukum Islam.
- b. Secara Praktis, penelitian ini di maksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka ke Islaman, selain itu juga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai sistem *paylater* di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*).

2. Kegunaan Praktisi

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif*.

Alasannya karena penelitian ini mengkaji suatu bentuk utang piutang yang

hadir dengan konsep baru yang berdasarkan riset yang bersifat *deksriptif* dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna akan lebih di tekankan dalam *kualitatif*. Untuk menghasilkan gambaran yang baik dibutuhkan serangkain langkah yang sistematis, adapun langka-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini berupa penelitian lapangan (*field research*). Di namakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di lapangan, pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat.

Data yang akan dikumpulkan yaitu mengamati secara langsung sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli *online* di PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya, termasuk penelitian *deskriptif analisis*. Penelitian *deskriptif analisis* adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁸

Penelitian *deskriptif analisis* ini digunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya. Dalam kaitan ini, penelitian ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang sistem *paylater* di PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*).

⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 63.

3. Data Sumber

Proses penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber data sebagai pusat informasi pendukung dan pelengkap sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Selanjutnya data ini disebut langsung atau data asli, adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini diantaranya riset lapangan (*field research*),⁹ yaitu data tentang sistem *paylater* di PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, kita-kitab fiqih, buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi Berjumlah lebih dari 20 orang yang terdiri dari pengguna *paylater* dan karyawan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*).

⁹Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari suatu subjek atau objek yang mewakili populasi. Jumlah dan karakteristik yang dimiliki atau populasi tersebut, bila populasi besar maka penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya di karenakan keterbatasan dana, waktu serta tenaga yang dimiliki penelitian, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi, sampel yang digunakan untuk menggumpulkan data yaitu menggunakan *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan menentukan sendiri sampel yang diambil karena pertimbangan tertentu¹⁰. Maka sampel yang diambil dari penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari 2 karyawan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dan 5 orang sebagai pengguna sistem *Paylater*.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Menurut S Nasution wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunitas verbal. Jadi, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Bentuk wawancara yang dipakai adalah wawancara tidak berstruktur cara ini dipakai supaya lebih memudahkan dalam mencapai suatu tujuan.¹¹ Wawancara ini memakai

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2006). H.108

¹¹Nasution, *Metode Penelitian Riserch*, (Bandung: Bumi Aksara, 2000), h.115

teknik bebas terpimpin yaitu penulis lebih dulu menyiapkan kerangka pertanyaan. Wawancara dilakukan dengan 5 orang pengguna sistem *paylater* dan 2 karyawan *Gojek*. Dari hasil wawancara yang dilakukan pengguna dan karyawan *Gojek* mengatakan bahwa sistem *paylater* yaitu pihak *Gojek* akan menalangi terlebih dahulu transaksi pengguna dan akan dikenakan biaya administrasi atau biaya berlangganan dan jika belum membayar sampai jatuh tempo akan dikenakan denda.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan dalam pekerjaan dan dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli *online* di PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*).

6. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah. Pengolahan data akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah pemeriksaan data yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan di dalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban, tulisan yang sudah benar dan relevan dengan data penelitian sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli *online* di PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*).

b. Sistematis data (*systematizing*)

Sistematis adalah melakukan pengecekan data atau bahan yang diperoleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan data yang diperoleh dari penelitian sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli *online* di PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*).

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian, pemakaian sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli online menurut perpektif Hukum Islam yang akan didahului dengan metode *deskriptif* analisis *kualitatif*, yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli *online* di PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*). Pendekatan berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan untuk mengetengahkan data-data mengenai yang sifatnya khusus mengenai sistem *Paylater* dalam pembayaran jual beli di PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad *Qard* menurut Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Qard*

a. Pengertian *Qard*

Utang piutang dalam Islam sering dikenal dengan istilah *al qard*. Bahwa *al qard* (utang) menurut bahasa adalah potongan,¹² dan harta yang diambil oleh debitur dinamakan dengan *qard* karena kreditor memotong dari hartanya.¹³ *Al-qard* menurut Muhammad Syafi'i Antonio adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹⁴ Akad *qard* adalah transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Pengertian *qard* menurut istilah para ulama antara lain sebagai berikut:

- 1) Mazhab maliki berpendapat bahwa *qard* adalah menyerahkan sesuatu harta yang bernilai kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya, dimana harta yang diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi dengan cara yang tidak halal, dengan ketentuan barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak berbeda dengan yang diterima.

¹²Ismail Nawawi, h. 178.

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009). h. 115.

¹⁴Muhammad Syafi'i Antonio, h. 131.

- 2) Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *qard* adalah akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.
- 3) Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *qard* kepemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama.
- 4) Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa *qard* adalah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya.

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *qard* adalah akad tertentu antara dua belah pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.¹⁵

2. Dasar hukum *Qard*

Hukum *qard* pada dasarnya adalah perbuatan baik yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukumnya mubah atau boleh. Pada dasarnya *qard* adalah perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dasar hukum *qard* diatur dalam Al-Qur'an, hadist, maupun ijma' antara lain:¹⁶

a. Al-Qu'ran

1) Surah Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

¹⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 229-230.

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 274-275.

Artinya: “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lalu kamu dikembalikan.”¹⁷

2) Surah Al-Maidah ayat 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”¹⁸

3) Surah Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

4) Surah At-Taghabun ayat 17

إِنْ تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ

حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya: Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, h. 39.

¹⁸ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Permanet Publishing, 2016) h.

b. Hadist

Hadist tentang utang piutang antaranya:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ
يُقْرِضُ مُسْلِمًا فَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا أُنْ أَوْصَقَتْهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)¹⁹

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Nabi besar SAW bersabda:

seorang muslim yang mempiutangi seorang muslim dua kali

seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali.”

Bahwa tidak ada seorang pun yang hidup tanpa adanya bantuan maupun pertolongan dari orang lain. Seseorang tidak memiliki segala barang yang ia butuhkan melainkan butuh bantuan saudaranya. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini ada Islam agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan umatnya.²⁰

c. Ijma

Para ulama menyepakati bahwa *qard* hukumnya boleh dilakukan.

Qard diperbolehkan karena *qard* mempunyai sifat *mandup* (dianjurkan)

bagi orang yang menghutangi dan mubah bagi orang yang berhutang.

Kesepakatan ini didasarkan pada sifat manusia yang tidak bisa hidup

tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu pinjam

meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam

adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Tujuan dan hikmah diperbolehkannya pinjaman tersebut adalah memberi

¹⁹Abu Abdullah Bin Yazid Al-Quzwaini Ibnu Maah, Sunan Ibnu Majah, (Digital Library, Al maktabah Al-syamilah Al-isdar Al-sani, 2005). VII/378, hadits nomor 2524.

²⁰Ismail Nawawi , h. 178.

kemudahan bagi umat manusia dalam kehidupan, dengan demikian orang yang kekurangan tersebut dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.²¹

Muqrid (pemberi utang) Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Sedangkan dari sisi *muqtarid*, utang bukanlah perbutan yang dilarang, melainkan dibolehkan. Hal ini karena seseorang yang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangkannya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis yang diterimanya.²²

Hukum *qard* pada dasarnya adalah sunah bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang meminta diberikan utang. Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa untuk menghindarkan dirinya dari bahaya seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.²³

Berdasarkan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) disebutkan bahwa hukum dari pinjaman adalah sebagai berikut:

- a. Qard menghasilkan penetapan pemilikan, jika seseorang meminjamkan mobil, *muqratid* berhak untuk menyimpan, memanfaatkan, serta mengembalikannya dikemudian hari.
- b. Para ulama sepakat bahwa penyelesaian akad *qard* harus dilakukan di daerah tempat *qard* itu di sepakatin, penyelesaian akad *qard* sah

²¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 223-224.

²² Ahmad Wardi Muslich, h. 275.

²³ Rozalinda, h. 231.

dilakukan ditempat lain jika tidak ada biaya transportasi atau memang disepkatin demikian.

- c. Islam juga mengajarkan agar pemberian qard oleh muqrid tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh muqtarid kepadanya. Misalnya seseorang akan meminjamkan mobil kepada temannya asalkan ia dibolehkan menginap di rumah temannya tersebut, namun jika si peminjam (muqrid) itu memberikan sesuatu sebagai tanda terimakasih dan tanpa diminta, hal itu dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.
- d. Qard juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual beli. Misalnya, seorang pedagang meminjamkan sepeda motor kepada temannya, asalkan temannya itu berbelanja ditempatnya.²⁴

3. Rukun dan Syarat *Qard*

Agar akad yang dilakukan dalam *qard* menjadi sah, maka rukun *qard* sebagai berikut:

- a. *Muqrid* (pemberi pinjaman)

Yaitu orang yang memberikan pinjaman atau menyediakan harta harus *ahliya tabarru'*. Yaitu seorang *muqrid* harus mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syara' tanpa suatu paksaan, dan jika memberikan pinjaman harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tanpa ada pihak ketiga yang ikut campur²⁵

²⁴ Ismai Nawawi, 179.

²⁵ Ahmad Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), 52.

b. *Muqtarid* (peminjam)

Yaitu orang yang meminjam suatu benda atau harta yang harus *ahliyah muamalah*. Artinya seseorang yang sudah baligh, berakal sehat dan tidak mahjur (bukan seseorang yang oleh syariat tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena adanya beberapa faktor). Jadi, apabila ada anak kecil atau orang gila yang melakukan peminjaman maka tidak sah dan tidak memenuhi syarat.

c. *Muqtarad* (harta yang dipinjamkan atau objek akad)

Yaitu harta yang dipinjamkan atau obyek dalam suatu akad. Menurut ulama Hanafiyah, harta yang dipinjamkan harus *mitsli*. Sedangkan jumhur ulama memperbolehkan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian dan harta *mitsli* seperti hewan, barang tidak bergerak dan sebagainya. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, serta ukuran panjang agar mudah dikembalikan.

d. *Sighat* (ijab dan Qabul)²⁶

Ijab kabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab untuk menerimanya. Sighat atau akad akan dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul.

²⁶M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: Logung, 2009), h. 142.

Sighat akan dinyatakan melalui ijab dan kabul sebagai berikut:

- 1) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami
- 2) Antara ijab dan kabul harus ada kesesuaian
- 3) Pernyataan ijab dan kabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada keraguan.²⁷

Syarat-syarat yang terkait dengan akad *qard*, dirinci berdasarkan rukun akad *qard* antara lain:

a. Syarat *aqidain* (*Muqrid* dan *Muqtarid*)

- 1) *Ahliyat al-tabarru'* (layak bersosial) adalah orang yang mampu mentasarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Dalam pengertian ini anak kecil yang belum mempunyai kewenangan untuk mengelola hartanya, orang cacat mental dan budak tidak boleh melakukan akad *qard*.
- 2) Tanpa ada paksaan bahwa *muqrid* dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain. Demikian juga *muqtarid*. Keduanya melakukannya secara sukarela.

b. Syarat *muqtarad* (barang yang menjadi objek *qard*) adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak bernilai secara syar'i tidak di transaksikan.

c. Syarat *sighat*, ijab qabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan *qard* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqrid*. Demikian juga *sighat* tidak mensyaratkan *qard* bagi akad lainnya.²⁸

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 104

4. Macam-macam akad Qard

Akad qard dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu dilihat dari segi subjeknya (pemberi hutang), dari segi kuat lemahnya bukti, dan dari segi waktu pelunasannya.²⁹

a. Dilihat dari pihak pemberi hutang menurut ulama fiqh, hutang dapat dibedakan atas:

- 1) *Duyun Allah* (hutang kepada Allah), ialah hak-hak yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena perintah Allah kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya.
- 2) *Duyun al-Ibad* (hutang kepada sesama manusia), yaitu hutang yang dikaitkan dengan jaminan tertentu, dan hak orang yang berpiutang itu diambilkan dari jaminan tersebut, jika orang yang berutang tidak mampu membayarnya.

b. Dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian kebenarannya dapat dibedakan atas:

- 1) *Duyun al-sihah*, adalah hutang piutang yang keberadaannya dapat dibuktikan dengan surah keterangan atau pernyataan tertulis, dan pengakuan yang jujur dari orang yang berutang, baik ketika dia sedang dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit yang belum terlalu parah.
- 2) *Duyun al-marad*, adalah hutang piutang yang hanya didasarkan atas pengakuan dari orang yang berutang ketika dia sedang sakit parah

²⁸ *Ibid*, h. 143.

²⁹ Khoirul Faiq, "al-Qardh", <http://khoirulfaiq.blogspot.com/2012/08/al-qardh.html> "diakses pada" 30 Oktober 2020 pukul 19.32 WIB.

yang beberapa saat kemudian meninggal, atau pengakuan yang diucapkan ketika dia akan menjalani hukuman (hukuman mati) dalam tindak pidana pembunuhan.

c. Dilihat dari segi pelunasannya dibedakan atas:

- 1) *Duyun al-halah* adalah hutang piutang yang sudah tiba waktu pelunasannya atau hutang yang sudah jatuh tempo sehingga harus dibayar dengan segera.
- 2) *Duyun al-mujjalah* adalah hutang piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mesti dibayar dengan segera.³⁰

5. Tambahan akad *Qard*

Terdapat dua macam penambahan pada *qard*, antara lain sebagai berikut:

- a. Penambahan yang disyaratkan. Hal tersebut dilarang berdasarkan *ijma'*. Begitu pula manfaat yang disyaratkan, seperti pernyataan: “aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu. Atau syarat manfaat lainnya. Hal demikian termasuk rekayasa riba.
- b. Penambahan ketika membayar utang tanpa syarat, maka hal yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan *hadith* yang telah dijelaskan pada dasar hukum *qard*.

Ketika pengembalian barang pinjaman yang diwajibkan memiliki nilai seimbang kadarnya. Karena kedua belah pihak diharuskan mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Dengan tujuan agar

³⁰ *Ibid.*

keseimbangannya benar-benar dapat diwujudkan. Hal demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang memiliki unsur riba atau tidak, kadar nilainya harus sama dan tidak boleh lebih walaupun sedikit, begitu pula mengenai kelebihan kualitas atau lebih jelek. Demikian hukum dasarnya. Akan tetapi, kelebihan kadar dan sifat asalkan tidak disyaratkan masih diperbolehkan.³¹

Pelunasan atau pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak. Saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Sebab tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannya dilarang memberikan penambahan. Akan tetapi kalau yang berhutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan yang berhutang.

Dalam hal ini *qard* adalah pinjam meminjam atau sistem hutang piutang yang dapat disebut dengan kredit. Sedangkan kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere* yang artinya percaya. Bila dihubungkan dengan bank maka mengandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah atau debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan.³²

³¹Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah AlHanif, 2009), 168-169

³²R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*(Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), 165.

6. Ketentuan akad *Qard*

Qardh atau hutang piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli karena *qardh* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. *Qardh* juga merupakan salah satu jenis *salaf* (*salam*). Beberapa ulama, seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *qardh* (hutang piutang) adalah jual beli itu sendiri hanya saja Imam Al-Qarafi menyebutkan tiga perbedaan antara *qardh* dan jual beli, berkaitan dengan kaidah syar'iyah, yaitu sebagai berikut:

- a. Berlaku kaidah riba, apabila *qardh* itu dalam harta atau barang-barang yang termasuk kelompok *ribawiyah*, seperti *makilat* (barang-barang yang ditakar) dan *mauzunat* (barang-barang yang ditimbang) menurut Hanafiah dan *qaul* yang *shahih* dari Hanabilah, mata uang (*nuqud*) atau makanan pokok menurut Malikiyah, dan mata uang (*nuqud*) atau makanan menurut Syafi'iyah.
- b. Berlaku kaidah *muzabanah*, yaitu jual beli barang yang jelas dengan barang yang tidak jelas dari jenisnya, apa bila *qardh* (hutang piutang) itu di dalam *mal ghair mitsli*, seperti binatang.
- c. Berlaku kaidah menjual barang yang tidak ada di tangan seseorang apabila *qardh* (hutang piutang) di dalam *mal mitsli*.

Menurut Malikiyah, *qardh* hukumnya sama dengan hibah, *shadaqah* dan *ariyah*, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (*ijab qabul*), walaupun *muqtaridh* belum menerima barangnya. Dalam hal ini *muqtaridh* boleh mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut *mitsli* atau *gair*

mitsli apabila barang tersebut belum berubah dengan ambah atau kurang. Apabila barang telah berubah maka *muqtaridh* wajib mengembalikan barang yang sama.

Menurut pendapat yang shahih dari Syafi'iyah dan Hanabilah, kepemilikandalam *qardh* berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut Syafi'iyah, *muqtaridh* mengembalikan barang yang sama kalau barangnya *mal mitsli*. Apabila barangnya *mal mitsli* maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. Hal ini sesuai dengan hadis Abu Rafi' di atas, di mana Nabi saw berutang seekor unta perawan kemudian diganti dengan unta yang umurnya enam masuk tujuh tahun. Setelah itu Nabi Muhammad saw bersabda: sesungguhnya orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang (HR. Jama'ah kecuali Al-Bukhari). Menurut Hanabilah dalam barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), sesuai dengan kesepakatan *fuqaha*, di kembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan dalam barang yang bukan *makilat* dan *mauzunat*, ada dua pendapat. Pertama, dikembalikan dengan harga yang berlaku pada saat berhutang. Kedua, dikembalikan dengan barang yang sama yang sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang di hutang atau dipijam.³³

Al-qardh pada hakikatnya adalah tolong menolong kepada saudara kita yang benar-benar membutuhkan bantuan pinjaman yang baik berupa

³³ Ibid, h. 67

uang maupun benda lainnya, namun sering terjadi peminjaman itu berupa uang tunai. Orang yang berhutang harus mengembalikan uang tunai yang telah dipinjam sesuai dengan perjanjian atau akad di awal. Akad utang piutang dimaksud untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, dalam utang piutang tidak di benarkan mengambil keuntungan oleh pihak muqaridh (orang yang mengutangkan).³⁴

Menurut Syafi'iyah, *muqtaridh* mengembalikan barang yang sama kalau barangnya *mal mitsli*. Apabila barangnya *mal mitsli* maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang barang yang dipinjamnya. Hal ini sesuai dengan hadis Abu Rafi' di atas, di mana Nabi saw berutang seekor unta perawan kemudian diganti dengan unta yang umurnya enam masuk tujuh tahun. Setelah itu Nabi Muhammad saw bersabda: sesungguhnya orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang (HR. Jama'ah kecuali Al-Bukhari). Menurut Hanabilah dalam barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), sesuai dengan kesepakatan *fuqaha*, dikembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan dalam barang yang bukan *makilat* dan *mauzunat*, ada dua pendapat. Pertama, dikembalikan dengan harga yang berlaku pada saat berhutang. Kedua, dikembalikan dengan barang yang sama yang sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang dihutang atau dipinjam.

³⁴ R. Abdul Djamali, h. 171

Al-qardh pada hakikatnya adalah tolong menolong kepada saudara kita yang benar-benar membutuhkan bantuan pinjaman yang baik berupa uang maupun benda lainnya, namun sering terjadi peminjaman itu berupa uang tunai. Orang yang berhutang harus mengembalikan uang tunai yang telah dipinjam sesuai dengan perjanjian atau akad di awal. Akad utang piutang dimaksud untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil. *Qardh* merupakan suatu pendekatan untuk *bertaqorrub* kepada Allah swt dan merupakan jenis muamalah yang bercorak *taawun* (perolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena si *muqtaridh* (penghutang) tidak diwajibkan memberikan *iwadh* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada *muqridh* (yang meberikan pinjaman) karena *qardh* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari keluh kesah permasalahan yang dihadapi mereka keuntungan oleh pihak *muqaridh* (orang yang mengutangkan).³⁵

Hutang piutang yang terjadi harus sesuai dengan ajaran syari“at Islam yaitu tanpa adanya tambahan atau pengurangan jumlah uang tunai yang biasa kita sebut riba. Pelunasan atau pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan

³⁵Rozalinda, h. 233

tambahan melebihi dari jumlah yang di terima, maka pengembaliannya pun dilarang memberikan penambahan. Tetap jika yang berhutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh di terima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang. Jika yang dipinjamkan berupa barang yang bernilai maka pengembalian yang benar menurut kebanyakan penganut madzhab syafi'i, termasuk salah satu pendapat Zhahiriyyah, adalah barang yang serupa bentuknya. Dalilnya adalah hadits Abu Rafi', "Bahwasannya Nabi saw meminjam seekor unta kecil (masih bayi) binatang ini adalah binatang yang bernilai kemudian beliau menyuruhku (Abu Rafi') untuk mengembalikan pinjamannya dengan unta ruba'iy (unta yang berumur tujuh tahun). Sedangkan unta kecil itu masih berusia remaja." Jika tidak memungkinkan untuk mengembalikan barang yang sama persis maka menurut Zhahiriyyah, kembalikanlah dengan nilai yang sama dan berusaha untuk mengembalikan tepat pada hari yang telah dijanjikan.³⁶

7. Berakhirnya akad Qard

Akad *qard* berakhir apabila *qarad* atau objek akad ada pada *muqtarid* (orang yang meminjam). telah diserahkan atau dikembalikan kepada *muqrid* (pemberi pinjaman) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian.

Akad *qard* juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila *muqtarid* (orang yang berhutang) meninggal dunia maka *qard* atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi hutang tersebut. Tetapi *qarad* dapat di anggap

³⁶ R. Abdul Djamali, h. 165

lunas atau berakhir jika *muqrid* (pemberi pinjaman) menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.

Pendapat kedua menurut Syafi'i, termasuk juga pendapat Zhahiriyyah yang lain, adalah pengembaliannya di samakan nilainya. Sebab tidak mungkin untuk mengembalikan barang yang sama persis dari semua aspeknya. Nilai itu dihitung saat penyerahan kepada pemberi pinjaman. Sebab pinjaman juga memiliki nilai pinjaman setelah diserahkan kepadanya, seperti yang dikemukakan oleh Zhahiriyyah, demikian juga Syafi'i. Pendapat lainnya dari kalangan Syafi'i adalah nilainya dihitung saat penyerahan pinjaman. Ada yang mengatakan nilainya lebih banyak dari pada nilai saat penyerahan pinjaman. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa pengembaliannya harus sama, baik pinjaman berupa barang bernilai ataupun bukan. Tampaknya masalah yang mereka katakan tersebut adalah jika memungkinkan bisa mengembalikannya dengan nilai yang sama.

Permasalahan ini sangat erat korelasinya dengan masalah riba. Seperti yang telah diketahui bersama, menurut ahli fiqh, memberikan pinjaman bisa saja berupa barang yang berpotensi riba ataupun yang bukan. Dalam transaksi pemberian pinjaman, tidak ada bedanya antara harta yang berpotensi riba dan yang bukan berpotensi riba, seperti yang dikatakan oleh Nawawi. Ibnu Hazm berkata, "Riba dalam memberikan pinjaman bisa terjadi dalam bentuk apa pun maka tidak boleh meminjamkan sesuatu agar mendapat pengembalian yang lebih banyak atau lebih sedikit, tidak juga dengan pengembalian barang lain, tetapi harus sama bentuk dan kadar dengan barang yang dipinjamkannya.

Seluruh ahli fiqih sepakat bahwa uang tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah dilarang, baik uang tambahan itu sejenis dengan uang yang dipinjamkannya ataupun tidak. Sebab hal ini telah menyeleweng dari tujuan utama memberikan pinjaman, yaitu kasih sayang. Berkaitan dengan syarat seperti itu, Hanafi berpendapat bahwa hukum memberikan tetap sah tetapi syarat tersebut tidak sah. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa akad bersyarat tersebut tidak sah.³⁷

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang berpendapat adanya *khiyar majlis*, dalam akad *qardh* tidak ada *khiyar majlis* dan tidak pula *khiyar syarat*, karena maksud dari *khiyar* adalah pembatalan akad (*al-faskh*). Padahal dalam akad *qardh*, siapa saja dari kedua belah pihak memiliki hak untuk membatalkan akad bila ia berkehendak, sehingga hak *khiyar* ini menjadi tidak bermakna. Mengenai batas waktu, jumhur fuqaha tidak membolehkannya dijadikan sebagai syarat dalam akad *qardh*. Oleh karenanya, apabila akad *qardh* ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka ia tetap dianggap jatuh tempo. Pasalnya, secara esensial ia sama dengan bentuk jual beli dirham dengan dirham, sehingga bila ada penangguhan waktu maka ia akan terjebak dalam riba *nasi'ah*.³⁸ Lain dari pada itu akad *qardh* tidak boleh menyertakan batasan jatuh tempo, sebab syarat ini menuntut penambahan kompensasi, sementara kompensasi *qardh* tidak mengalami *fluktuasi* (bertambah atau berkurang). Apabila syarat tersebut telah disertakan dalam perjanjian *qardh*, ia tidak berlaku. Akan

³⁷ *Ibid*, h. 167.

³⁸ Abdul „Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing), 2011, hlm.326.

tetapi menurut Imam Malik bahwasannya “boleh ada syarat waktu dalam *qiradh*, dan syarat tersebut harus dilaksanakan. Apabila *qiradh* ditentukan hingga waktu tertentu, pemberi *qiradh* tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba.

Al-Qardh merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial, maka pemberi pinjaman berhak meminta ganti hartanya jika telah jatuh tempo. Hal itu karena akad *qardh* adalah akad yang menuntut pengembalian harta sejenis pada barang *mitsliyat*, sehingga mengharuskan pengembalian gantinya jika telah jatuh tempo, seperti keharusan mengganti barang yang rusak. Maka demikian pula utang yang sudah jatuh tempo tidak dapat ditangguhkan meski ada penangguhan. Hal ini berbeda dengan masalah barang pengganti dalam akad jual beli atau akad *ijarah*, dimana jika terjadi penangguhan dalam akad itu hingga waktu tertentu maka tidak dibolehkan menuntut penyerahan barang pengganti sebelum datang tempo yang demikian itu.³⁹

8. Waktu dan Sistem pembayaran menurut Islam

Seseorang yang mampu membayar utang pada waktu yang telah ditentukan maka ia termasuk orang terpuji sebaliknya bagi orang yang suka menunda nunda atau enggan membayar utang padahal ia mampu untuk membayarnya maka ia termasuk orang yang zalim dan akan memperoleh dosa besar.⁴⁰

³⁹ *Ibid*, h. 328.

⁴⁰ Khumedi Ja'fa, h. 127.

a. Hukum menunda pembayaran utang

Hukum menunda pembayaran utang dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Hukum menunda pembayaran utang adalah haram. Jika orang yang berhutang tersebut telah mampu membayar utang dan tidak memiliki *udzur* yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan utang memintanya atau setelah jatuh tempo.
- 2) Hukum menunda pembayaran utang adalah mubah, apabila orang yang berhutang memang benar-benar belum mampu membayarnya atau ia telah mampu membayarnya namun masih berhalang untuk membayarnya, misalnya uang yang ia miliki belum berada ditangannya atau alasan-alasan lain yang dibenarkan agama.

Demikian jelaslah bahwa orang yang menunda atau enggan membayar utang padahal ia mampu untuk membayarnya termasuk akhlak atau perbuatan yang tercela dan dipandang sebagai perbuatan dzalim dan penipu dalam berbisnis (bermuamalah).

b. Dampak negatif utang piutang

Utang dapat berakibat buruk bagi orang yang membiasakan melakukannya. Diantara akibat buruk itu adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat menggoncangkan pikiran sebab dengan utang pikiran tidak tenang, seolah olah selalu dikejar kejar orang.
- 2) Dapat mengganggu nama baik keluarga, sebab para penagih utang bisa datang setiap saat. Sehingga bisa membuat orang yang berhutang menjadi malu.

- 3) Utang yang sudah lama belum terbayar, akan membuat sakit hati bagi orang yang memberi utang. Sehingga hubungan yang selama ini baik menjadi renggang bahkan bisa menjadi putus.
- 4) Jika utang seseorang sudah menumpuk (banyak) dan belum bisa dibayar, maka dapat menghambat usaha bagi orang yang memberikan utang.
- 5) Jika utang seseorang sudah terlanjur banyak, dan tidak bisa membayar utangnya, maka dapat menyebabkan orang yang berhutang berbuat nekat untuk melakukan perbuatan jahat, seperti mencuri, merampok, merampas, dan lain sebagainya demi untuk membayar utangnya tersebut.⁴¹

c. Faktor pendorong melakukan utang piutang

Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mendorong seseorang berhutang, antara lain:

- 1) Keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntutan kebutuhan ekonomi.
- 2) Kebiasaan berhutang, sehingga kalau utangnya sudah lunas rasanya tidak enak kalau tidak utang lagi.
- 3) Karena kalah judi, sehingga ia berhutang untuk segera membayar kekalahannya.
- 4) Ingin menikmati kemewahan yang tidak (belum) bisa dicapainya.
- 5) Untuk dipuji orang lain, sehingga berhutang demi memenuhi yang diinginkan (karena gengsi atau gaya-gayaan).⁴²

⁴¹*Ibid*, h, 128.

⁴²*Ibid*, h. 129.

d. Etika dalam utang piutang

Sebagian dari kita mengalami masa sulit ekonomi dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Salah satunya dengan meminta tolong dipinjamkan uang (utang). Dan akan mengganti uang tersebut pada jangka waktu tertentu. Namun tidak semua orang tahu peraturan tidak tertulis atau etika baik dalam utang piutang dimasyarakat.⁴³

Adapun etika baik dalam utang piutang sebagai berikut:

- 1) Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau menegmbalikannya.
- 2) Pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berutang. Bila yang meminjam belum mampu mengembalikan, pihak yang memberikan utang memberikan waktu penundaan untuk membayarnya. Dan jika yang meminjam betul betul tidak mampu mengembalikan maka yang meminjamkan hendaknya membebaskannya.
- 3) Demi terjaganya hubungan baik hendaknya utang piutang diperkuat dengan tulisan dari kedua belah pihak dengan disaksikan dua orang laki laki atau dengan seseorang saksi laki laki dan dua orang wanita.
- 4) Ketika mengembalikan utang atau pinjaman hendaknya peminjam mengembalikan pinjaman sesuai dengan kualitas sebagai rasa terima kasih peminjam mengembalikan pinjaman dengan kualitas dan kuantits yang lebih baik.

⁴³M. Ali Hasan, h. 234.

5) Pihak yang berutang apabila mampu membayar pinjaman atau utangnya hendaklah mempercepat membayar utangnya sebab sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang artinya “melalaikan dalam membayar pinjaman atau utang, berarti ia telah berbuat dzalim kepada pemberi pinjaman atau utang padahal ia telah menolongnya.”⁴⁴

e. Berakhirnya perjanjian dalam utang piutang

Utang piutang dinyatakan berakhir atau selesai apabila waktu yang disepakati telah tiba dan orang yang berhutang telah mampu melunasi utangnya. Dalam keadaan yang demikian, maka seseorang yang berhutang wajib melunasi utangnya. Mengenai masalah utang piutang maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu:

1) Perpanjangan pelunasan utang

Apabila kondisi orang yang berutang sedang berada didalam kesulitan dan ketidak mampuan, maka orang yang berpiutang dianjurkan memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai orang yang berpiutang mampu untuk membayar utangnya. Adapun hukum utang piutang itu sendiri asalnya adalah mubah jika dia bukan dalam keadaan darurat dengann catatan dia mampu untuk melunasi utangnya tersebut. Dan wajib hukumnya berutang jika dalam keadan darurat. Misalnya jika berutang maka dia akan meninggal dunia, dan menjadi haram jika tidak dalam keadaan darurat dan diyakini tidak mampu melunasi hutangnya tersebut.⁴⁵

⁴⁴ Hendi Suhedi, h. 98.

⁴⁵ Abdul rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, (jakarta: Kencana, 2010), h. 253.

2) Sesuatu yang dikembalikan dalam utang piutang

Menurut Imam Abu Hanifa dan Muhammad utang piutang berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikannya dengan sejumlah uang yang sama, bukan uang yang diterimanya.

3) Melebihi pembayaran

Melebihi pembayaran dari jumlah utang yang diterima menjadi dua macam yaitu kelebihan yang tidak diperjanjikan dan kelebihan yang diperjanjikan. Akad *qard* termasuk kedalam akad *tabarru*, karena didalamnya ada unsur menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Oleh sebab itu, *muqrid* berhak meminta agar harta yang dipinjam dikembalikan dengan segera. Dalam persoalan pembayaran utang, Nabi telah menganjurkan agar seseorang agar menyegerakan pembayaran utangnya. Karen menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu, termasuk ke dzaliman.

Unsur sukarela dari para pihak dari yang melakukan akad, dalam konteks ini tidaklah boleh dilakukan akad *qard* oleh salah satu pihak atau kedua duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu baik datangnya dari pihak pihak yang berikat atau dari pihak yang lain. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT yang artinya: “*wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu.*” Dari

arti diatas, menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah di janjikan dan diakadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁴⁶

Seseorang tidak mampu membayar utangnya, disunatkan terhadap orang yang berpiutang untuk menunda tagihan pada orang tersebut karena memberikan kelonggaran kepada orang yang dalam kesusahan akan diberikan kemudahan oleh Allah SWT pada hari kiamat.

Seseorang menukarkan (*iqtaradha*) satu kilo gram gadum misalnya, ia harus menjaga gandum tersebut dan harus memberikan benda sejenis gandum kepada *muqrid* yang meminta zatnya. Jika *muqrid* tidak memintanya, *muqtarid* tetap menjaga benda sejenisnya, walaupun *qarad* (barang yang ditukarkan) masih ada.akan tetapi, *muqtarid* tidak memiliki *qarad* selama *qarad* masih ada. Pengembalian *qarad* pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, dikalangan mereka ada dua pendapat. Pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama yaitu membayar nilainya pada hari akad *qarad*. Kedua, mengembalikan benda sejenis yang mendekati *qarad* pada sifatnya.⁴⁷

⁴⁶ Rachmawati Eka Nuraini “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktik di Pasar Modal Indonesia,” *Al-Adalah*, vol 14 no 4 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 786. (on-line), tersedia di

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362> (2 Agustus 2020, pukul 20:00WIB) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

⁴⁷ Rahmat Syafei, *Fikih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 155.

B. Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/ IX/2017 tentang uang Elektronik Syariah

1. Penerbitan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/ IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

Perkembangan zaman yang semakin pesat memicu pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan banyak bentuk-bentuk transaksi yang ada di masyarakat. salah satu kemajuan yang ramai saat ini adalah penggunaan uang elektronik, mulai dari *e- money* hingga untuk metode pembaruan di *e-commerce*.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut menyesuaikan perkembangan tersebut dengan prinsip-prinsip yang ada dalam syariat Islam. Pada 23 Januari 2018 atau *Dzulkaidah* 1439 H bertempat di Jakarta. MUI mengeluarkan dua fatwa baru, salah satunya adalah Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah ini.

Fatwa ini, akad anatar penerbit dengan pemegang elektronik dapat menggunakan akad *wadiah* atau akad *qard*. Sementara akad anatar penerbit dengan penyelenggara uang elektronik dan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah*, *jualah*, dan *akad wakalah bil ujah*.

Fatwa ini diharapkan masyarakat dapat lebih selektif dalam menggunakan uang elektronik yang saat ini marak berkembang agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Syariat Islam.

2. Alasan Penerbit Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/ IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

- a. Alat pembayaran berupa uang elektronik yang diterbitkan oleh bank ataupun lembaga non bank saat ini semakin banyak berkembang di Indonesia.
- b. Masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait uang elektronik dari segi syariah.
- c. Maka dari itu berdasarkan pertimbangan huruf a dan b DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang uang elektronik syariah untuk dijadikan pedoman.

3. Isi Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/ IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Pada Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/ IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah ini terdapat ketentuan umum berupa unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam uang elektronik syariah sebagai suatu alat pembayaran, antara lain:

- a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
- b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi.
- c. Jumlah nominal yang elektronik dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

- d. Di gunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.⁴⁸

Selain penjelasan tentang unsur-unsur pada uang elektronik syariah, didalam fatwa ini juga terdapat penjelasan mengenai ketentuan uang elektronik syariah yang digunakan dalam akad *qard*, antara lain:

- a. Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja.
- b. Penerbit dapat menggunakan (mengimplementasikan), uang hutang dari pemegang uang elektronik.
- c. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.
- d. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float).
- e. Tidak boleh bertentang dengan perundang-undangan.

Berdasarkan DSN-MUI No:116/DSN-MUI/ IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah ini, maka uang elektronik sebagai alat pembayaran tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *rishwah*, *israf* serta transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

C. Riba

Pengertian riba adalah akad yang terjadi dengan pertukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut syara' atau terlambat salah satunya.

Riba adalah penambah-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang

⁴⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/ IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2017).

memiliki harta kepada orang yang meminjamkan artanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁴⁹

Seluruh fuquha sepakat bahwasannya hukum riba adalah haram berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam al-Quran dan hadist. Pernyataan al-Quran tentang larangan riba terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang elah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”⁵⁰

QS. Ali-Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تَفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

⁴⁹ Muhammad Ilmi, *Mengenal Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pelita Utama, 2002), h. 12.

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan terjemahannya*, (Bandung: Al-Muyassar, 2014), h. 43.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”⁵¹

Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan At Tirmidzi: “Allah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, dua orang saksinya dan penulisnya (sekretarisnya).” sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ahmad: “satu dirham riba yang dimakan seseorang dengan sepengetahuan itu lebih berat dosanya dari pada tiga puluh enam berbuat zina.”

Riba dikelompokkan menjadi dua, masing-masing adalah riba utang-piutang (riba *dayn*) dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qard* dan riba *jahiliyah*. Adapun kelompok kedua, riba jual beli terbagi menjadi riba *fadh*l dan riba *nasi'ah* antara lain:⁵²

1. Riba *Qard*

Riba *qard* yaitu suara manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtarid*).

2. Riba *Jahiliyah*

Riba *Jahiliyah* adalah riba yang timbul ketika utang dibayar melebihi pokok pinjaman. Karena si peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu. Dinamakan riba jahiliyah karena banyak terjadi di zaman jahiliyah pada masa itu para kreditur ketika menagih pinjaman yang telah jatuh tempo akan menagih pelunasan seluruh pinjaman. Apabila tidak maka si peminjam harus memberikan tambahan dengan pengembalian yang ditangguhkan di lain waktu. Contohnya riba jahiliyah adalah transaksi

⁵¹ *Ibid*, h. 61.

⁵² Mardani, *Hukum sistem Ekonomi Islam*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h.

pembayaran kartu kredit. Bila pengguna kartu tidak melunasi tagihan saat jatuh tempo, maka dapat menunda pembayaran dengan dikenakan bunga.

3. Riba *fadl*

Riba *fadl* adalah riba yang muncul dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas, sama kuantitas, dan sama waktu penyerahannya. Menurut Rasulullah terdapat enam jenis barang apabila dipertukarkan tergolong riba jika tidak memenuhi tiga kriteria tersebut, yaitu: emas, perak, gadum, tepung, kurma, dan garam. Diluar keenam jenis barang tadi dibolehkan sepanjang penyerahan barang dilakukan pada saat yang sama.

4. Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* adalah riba yang muncul akibat adanya transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi kaidah: untung muncul bersama risiko, dan hasil usaha muncul bersama biaya. Riba *Nasi'ah* timbul manakala terjadi utang piutang hari ini dan dikembalikan pada hari lain dengan disertai adanya tambahan. Pihak yang memberikan utang telah memastikan diri memperoleh keuntungan berupa tambahan dana dari pokok yang dipinjamkan, tanpa menanggung semua resiko kerugian usaha dan beban biaya.⁵³

D. Tinjauan Pustaka

Skripsi yang disusun oleh Zainab Zalfa Assegaf mahasiswa UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2019 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang melalui Media Online (Studi di Aplikasi

⁵³Muhammad Ilmi, h. 13.

Pinjaman Yuk). Aplikasi Pinjaman Yuk ini mempunyai jasa memberi dana kepada masyarakat yang membutuhkan uang dengan proses cepat, melalui media online maka menggunakan sistem utang piutang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).

Pratik utang piutang yang terjadi di Aplikasi Pinjaman Yuk ialah kesepakatan uang piutang antara perusahaan dengan masyarakat yang meminjam dana dari perusahaan tersebut, dimana perusahaan menyediakan dananya dan masyarakat menerima dananya dan menanggung resiko penambahan dari utang pokok yang dikenakan Rp. 30,000,- perharinya maupun menanggung dendannya sebesar Rp. 30,000,- jika terlambat dari jatuh tempo. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang melalui media online di Aplikasi Pinjaman Yuk tidak sesuai dengan hukum Islam sebab mengandung unsur riba. Pertama, riba adanya penambahan dari utang pokok. Kedua, riba adanya denda jika terlambat dalam pelunasan atau melewati jatuh tempo. Hampir semua masyarakat yang pernah meminjam di Aplikasi Pinjam Yuk ini merasa dirugikan dan menyesal.⁵⁴ Skripsi ini dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis sama-sama membahas tentang utang piutang secara online, perbedaan dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis saat ini karena skripsi ini hanya membahas secara umum utang piutang dan tidak terkait dengan jual

⁵⁴Zainab Zalfa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang melalui Media Online*, (Lampung, Uin Raden Intan, 2019) , h. iii.

beli melainkan hanya melihat dari sudut pandang utang piutang secara elektronik.

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Danirrahman mahasiswa UIN Walisongo pada tahun 2019 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Online pada Aplikasi Cicil.co.id. Cicil.co.id merupakan sebuah aplikasi *startup* finansial berbasis teknologi yang memberikan akses pembiayaan bagi mahasiswa untuk membeli kebutuhan kuliah secara cicilan tanpa kartu kredit dari *e-Commerce* terpercaya mana saja di Indonesia. Mahasiswa dapat dengan mudah memilih produk yang ingin dibeli di berbagai *e-Commerce* Indonesia dengan cara mengkopi link produknya dan paste link pada platform cicil.com untuk mengetahui jumlah cicilan setiap bulannya. Serta pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan dari mahasiswa masing-masing, namun dalam praktiknya pihak perusahaan menerapkan sistem Dp dengan minimal 10%, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini ialah deskriptif analitik dimana penulis untuk mendeskripsikan serta menganalisis proses praktik tersebut, dengan menggunakan pendekatan normatif, yakni mengacu pada ketentuan fikih muamalah.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.co.id dengan menerapkan sistem uang muka ini ialah mengajukan dan mengisi form melalui online pada aplikasi Cicil.co.id, membeli barang dan transaksi (akad) yaitu dengan cara mengcopy link produk barang yang diinginkannya, misalnya dari “Lazada, Shopee, dan sebagainya,

dilanjutkan dengan memaste link produk tersebut pada kolom yang tersedia di aplikasi Cicil.co.id mengatur jumlah Dp dan dalam cicilan yang diinginkan, dan mengajukan cicilan dan proses *checkout*, dan serah terima barang dari pihak Ambassasor ke mahasiswa. Pada proses ini pihak Ambossador dari kampus mahasiswa terkait akan menyerahkan barang yang di beli yang dibiayai oleh PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi yang disaksikan oleh ambasador kampus terkait. Praktik tersebut ditinjau dari hukum Islam terdapat dua pendapat, menurut mayoritas ulama tidak sah, berdasarkan hadist larangan jual beli dengan uang muka dan jual beli mengandung unsur gharar (kesamaran) dan termasuk memakan harta dengan jalan batil, karena disyaratkan oleh si penjual tanpa adanya kompensasi. Sedangkan menurut ulama Hanabilah jual beli dengan uang muka hukumnya sah. Berdasarkan hadist Umar dari Safwan Ibn Umaiyah. “jika Umar rela dengan syarat, jika tidak maka Umar harus membayar sekian-sekian.” Serta hadist yang dijadikan argumentasi mayoritas ulama menurutnya-Nya lemah.⁵⁵ Skripsi ini berbeda dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis karena penelitian ini membahas tentang hutang piutang dengan sistem uang muka penelitian.

Skripsi yang disusun oleh Mikhrozul Rahmat mahasiswa UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2019 Hutang piutang yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Hutang Piutang secara Online (Studi Pada Aplikasi Uang Teman di Jl. Pulau Damar No. 36, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung dalam hukum Islam hukumnya diperbolehkan dan dapat

⁵⁵Muhammad Danirahman, *Tinjauan Hukum Terhadap Parktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.co.id*, (Semarang, Uin Walisongo, 2019), h. vii.

dinyatakan sah, apabila terpenuhinya rukun dan syarat, salah satunya yaitu tidak adanya tambahan baik berupa uang maupun barang yang disebut riba. Pada hakikatnya hutang piutang dalam Islam dilakukan atas dasar tolong menolong untuk kebaikan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana praktek hutang piutang secara *online* melalui aplikasi Uang Teman dan Bagaimana pandangan hukum Islam berkenaan dengan praktek hutang piutang secara *online* tersebut? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek hutang piutang uang secara *online* melalui aplikasi Uang Teman dan untuk mengetahui bagaimana menurut hukum Islam tentang hutang piutang melalui aplikasi Uang Teman tersebut.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field research*), yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari sejumlah responden yang terdiri dari karyawan staf Kantor Aplikasi Uang Teman di Jalan Pulau Damar sebagai penanggung jawab kelancaran bertransaksi di aplikasi Uang Teman dan nasabah. Sedangkan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara. Praktek hutang piutang secara *online* melalui aplikasi Uang Teman faktanya transaksi tersebut tidak berdasarkan niat untuk tolong menolong melainkan mendatangkan manfaat dan *income* (keuntungan) bagi pemberi hutang (*muqridh*). Selain bunga yang besar, dalam transaksi hutang piutang melalui aplikasi Uang Teman ini, jika nasabah telat dalam pembayaran atau

telah jatuh tempo maka dikenakan denda yang besar pula. Setelah itu pihak aplikasi menyebarkan foto wajah nasabah yang telat membayar keseluruhan kontak ponsel yang didapat pada saat awal melakukan transaksi peminjaman sebagai salah satu syarat agar uang tunai segera dicairkan ke nomer rekening nasabah. Hal itu sangat merugikan para nasabah Uang Teman. Dalam pandangan hukum Islam transaksi seperti ini diharamkan terkait adanya riba dari hutang piutang yang menghasilkan keuntungan serta denda yang besar apabila telah jatuh tempo dan penyebaran data pribadi apabila tidak segera membayar bunga beserta dendanya akibat menunggak pembayaran yang berkepanjangan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa hutang piutang secara online melalui aplikasi Uang Teman haram dikarenakan adanya riba (pengambilan manfaat) dan pencemaran nama baik dari transaksi hutang piutang tersebut. Skripsi ini dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis sama-sama membahas tentang hutang piutang secara online, perbedaannya yaitu skripsi ini membahas tentang dampak yang dialami oleh nasabah.⁵⁶

⁵⁶ Mikhrozul Rahmat , *Hutang piutang yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Hutang Piutang secara Online*, (Lampung , UIN Raden Intan, 2019), h.vii

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Penerbit J-Art, 2004)

Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2007)

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan terjemahannya*, (Bandung: Al-Muyassar, 2014)

Hadist

Abu Abdullah Bin Yazid Al-Quzwaini Ibnu Maah, Sunan Ibnu Majah, (Digital Library, Al maktabah Al-syamilah Al-isdar Al-sani, 2005). VII/378, hadits nomor 2524.

Buku

Abdul ,Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing).

Abdul rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Achmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000).

Ahmad Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Pustaka Media Group, 2010)

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013).

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003).

Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/ IX/2017 tentang
Uang Elektronik Syariah, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2017).

Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

Ismail Muhammad Syah , *Filsafat Hukum Islam, Cet Ketiga*, (Jakarta: BumiAskara, 1999).

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi Bisnis, Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017)

Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Permanet Publishing, 2016).

Mardani, *Hukum sistem Ekonomi Islam*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2015).

Mikhrozul Rahmat , *Hutang piutang yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Hutang Piutang secara Online*, (Lampung , UIN Raden Intan, 2019).

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010).

Muhammad Danirahman, *Tinjauan Hukum Terhadap Parktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.co.id*, (Semarang, Uin Walisongo, 2019)

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta:Gema Insani Press, 2001)

Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: Logung, 2009)

Nasution, *Metode Penelitian Riserch*, (Bandung: Bumi Aksara, 2000).

Priyono Utomo, *Raja Bisnis Online*, (Yogyakarta: Mediakom, 2013).

Rahmat Syafei, *Fikih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).

R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurik ulum Konsorsium Ilmu Hukum*(Bandung: CV. Mandar Maju, 1997)

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2006).

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009).

Zainab Zalfa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang melalui Media Online*, (Lampung, Uin Raden Intan, 2019).

Jurnal

Sejarah Gojek, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gojek>, “diakses pada” 17 juni 2020 pukul 10.01 WIB.

Gojek, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gojek_Indonesia, “diakses pada” 18 Juni 2020 pukul 10.01 WIB

Rachmawati Eka Nuraini “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktik di Pasar Modal Indonesia,” *Al-Adalah*, vol 14 no 4 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 786. (on-line), tersedia <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362> (2 Agustus 2020, pukul 20:00 WIB) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Khoirul Faiq, “al-Qardh”, <http://khoirulfaiq.blogspot.com/2012/08/al-qardh.html> “diakses pada” 30 Oktober 2020 pukul 19.32 WIB

Wawancara

Siska Puspita, Customer Servis, **Wawancara**, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*), 9 Juni 2020.

Catur Wahyono, Staff Administrasi, **Wawancara**, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*). 9 juni 2020.

Hasil wawancara dari sodari Dwi Cahya pada Riset, 1 Juni 2020 pukul 13.00 WIB.

Hasil wawancara dari sodari Anggi Cahya Ayu pada Riset, 3 Juni 2020 pukul 13.00 WIB.

Hasil wawancara dari sodari Sulistriandari, 3Juni 2020 pukul 15.00 WIB.

Hasil Wawancara dari sodara Cahyo Pratomo, 11 juni 2020 Pukul 16.00 WIB.

Hasil wawancara dari sodari Evi Lutfiah pada Riset, 25 Juni 2020 pukul 15.00 WIB.